

## **PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**

**Ilyas dan Bobby Rahman**

Program Studi Akutansi  
STIE Lhokseumawe

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Dana Alokasi khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh adalah  $Y = 1,196E11 - 0,210X_1 + 1,168X_2$ . Dengan koefisien regresi sebesar 0,210 menunjukkan bila DAK dan DAU bernilai 0 (konstan), maka Belanja Modal bernilai 1,196E11. Sedangkan setiap adanya peningkatan DAK dan DAU 100 rupiah, maka akan terjadi penurunan Belanja Daerah sebesar 210 rupiah. Koefisien DAU 1,168 artinya setiap penambahan DAU 100 rupiah akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,168 rupiah. Dari persamaan regresi, di ketahui bahwa koefisien korelasi ( $R$ ) = 0,971 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas (DAK dan DAU) dengan variabel terikat (Belanja Modal) memiliki hubungan (korelasi) sangat kuat. koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar = 0,943 atau 94,3%. Ini berarti dalam variabel terikat (Belanja Daerah) dapat dipengaruhi sebesar 94,3% DAU dan DAK dan sisanya sebesar 5,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dari hasil nilai determinasi ( $R^2$ ) atau Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap belanja modal Di Kabupaten Aceh Utara relatif kuat.

**Kata-kata kunci:** Dana Alokasi Khusus, Dana alokasi Umum dan Belanja modal

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dikukuhkan dengan Undang - undang (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang , dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut dikarenakan, dalam UU tersebut

diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (public service). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya.

Daerah diberikewenanganyang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber - sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber - sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah - daerah dari Pemerintah Pusat.

Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. Oleh sebab itu, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi

semakin kuat, khususnya pada daerah - daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim,2001).

Daerah -daerah yang kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengotimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal.

Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini (Yustikasari dan Darwanto, 2007).

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset

tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Provinsi Aceh untuk mengelola keuangan daerah termasuk kebijakan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pungky Ardhani (2011). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian Pungky Ardhani (2011). Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, tahun penelitian, variabel-variabel yang digunakan, objek penelitian adalah Kabupaten Aceh Utara dengan rentang waktu penelitian yaitu tahun 2003 s/d 2012.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Aceh Utara".

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Anggaran Daerah**

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2003).

Pengertian APBD sendiri ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya sama dengan tujuan dan fungsi APBD.

### **2. Pengertian Belanja Modal**

Menurut Halim (2004 : 73), "belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah

dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum". Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.

Dalam pengalokasian belanja modal keterbatasan sumber daya menjadi masalah utama, pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001) yang dikutip Darwanto dan Yulia. Dalam belanja modal dapat diakategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

#### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan

mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk

dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan

tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Tabel komponen biaya yang ada di dalam belanja modal dapat dilihat pada halaman berikutnya:

**Tabel 2.1 Jenis belanja modal dan komponen-komponennya**

Jenis belanja modal	Komponen biaya yang dimungkinkan dalam belanja modal
Belanja modal Tanah	Belanja modal pembebasan tanah Belanja modal pembayaran honor tim tanah Belanja modal pembuatan sertifikat tanah Belanja modal pengurangan dan pematangan tanah Belanja modal biaya pengukuran tanah Belanja modal perjalanan pengadaan tanah
Belanja modal Gedung dan Bangunan	Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan Belanja modal perizinan gedung dan bangunan Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan Belanja modal nonor perjalanan gedung dan bangunan
Belanja modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal bahan baku dan peralatan dan mesin Belanja modal upah tenaga kerja dan nonor pengelola teknis peralatan dan mesin Belanja modal sewa peralatan, peralatan dan mesin Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin Belanja modal perizinan peralatan dan mesin Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin
Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan Belanja modal perizinan jalan dan jembatan Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan

	Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama irigasi dan jaringan Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan
Belanja modal Fisik Lainnya	Belanja modal bahan baku fisik lainnya Belanja modal upah tenaga kerja dan pengelola teknis fisik lainnya Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya Belanja modal perizinan fisik lainnya Belanja modal jasa konsultan fisik lainnya

Sumber: *Halim (2004 : 73)*

### 3. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 162 UU No.32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur

lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Unsur-unsur DAK dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN;
- b. Dialokasikan kepada daerah tertentu;
- c. Digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah;
- d. Kegiatan khusus yang didanai dengan DAK harus sesuai dengan prioritas nasional/fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN;
- e. DAK ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau diusulkan oleh daerah tertentu;
- f. DAK diperuntukan guna membiayai kegiatan fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang.

### 4. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam, Darwanto dan Yulia mengungkapkan keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah dan modal. Studi Legrenzi & Milas (2001) dalam, Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti

empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal. Dalam jurnalnya Abdulah dan Halim mengungkapkan bahwa pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja daerah.

Penelitian David Priyo dan Priyo Hadi menunjukkan jika DAU berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Sejalan dengan penelitian tersebut Gunawan dan Erlina juga menunjukkan bahwa, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dalam Mardiasmo 2002 menjelaskan anggaran sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Dalam penjelasannya anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya.

### C. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2005 s/d 2015 yang berupa Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2009:8).

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi linear sederhana. Penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini karena hanya terdapat satu variabel independen (X).

Analisis regresi ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Belanja Modal

a = Nilai intercept (konstanta)

b = Koefisien regresi

X1 = Dana alokasi khusus

X2 = Dana alokasi umum

Harga a dihitung dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y(\sum X^2) - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Harga b dihitung dengan rumus:

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

### D. Hasil Penelitian

#### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena DAK

analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal (Santoso dan Ashari, 2005:231).

DAK Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) DAK sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

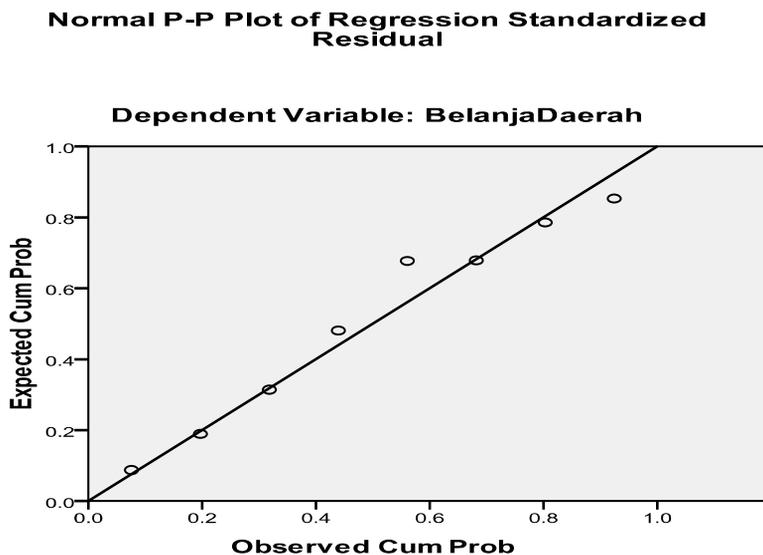
- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali 2007:110).

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan bantuan program *SPSS 17.0 for windows* yang mana hasilnya terlihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Normal P-P Plot



Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov*

menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 normal. Hasil *Kolmogrov-Smirnov* dapat maka data residual terdistribusi dengan dilihat di bawah ini:

**Tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.84515425
Most Extreme Differences	Absolute	.207
	Positive	.107
	Negative	-.207
Kolmogorov-Smirnov Z		.585
Asymp. Sig. (2-tailed)		.884

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Data Diolah, 2016*

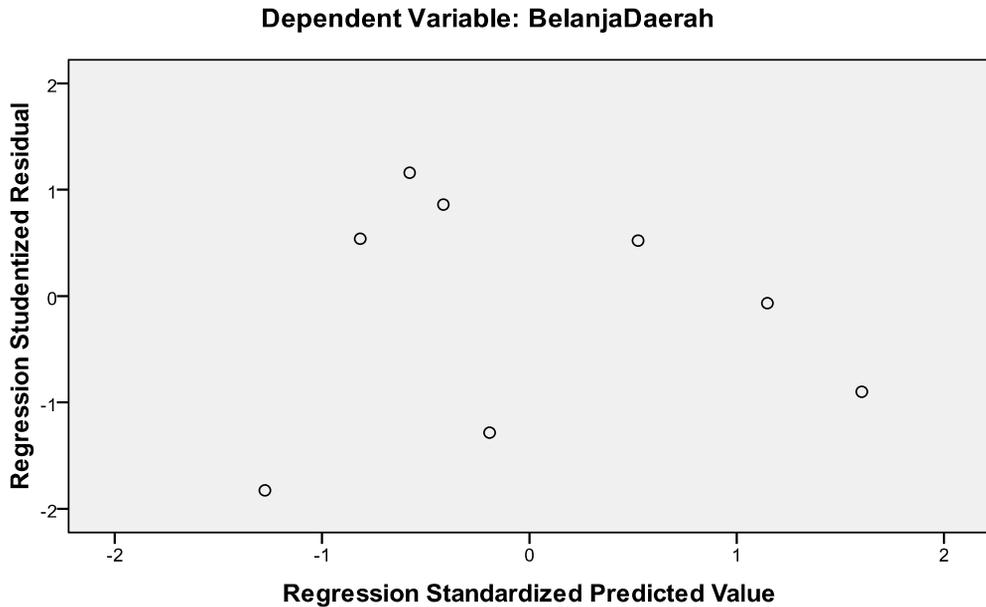
**2) Hasil Uji Heterokedastisitas**

Uji ini muncul apabila nilai kesalahan atau residual dari model yang dianalisis tidak memiliki *varian* yang konstan dari suatu observasi. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah *estimator*. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah grafik *scatter plot*. Grafik *scatter plot* dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada

grafik *scatter plot*. Jika data tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2001:77). Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut:

### Gambar 4.2 SCATERPLOT

#### Scatterplot



Sumber : *Data diolah (2016)*

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hasil penelitian dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

### 3) Uji Multikolinearitas

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance dan Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

**Tabel 4.3 Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).**

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.139	7.179
.139	7.179

Sumber: *Data diolah, 2016*

### 4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak

terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin Watson (DW test).

**Tabel 4.4 Uji Durbin Watson (DW test).**

Durbin-Watson
1.751

Sumber: *Data Diolah, 2016*

## E. Pembahasan

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini akan menjelaskan Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Hasil dari analisis regresi dapat diamati pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5 Analisis Regresi Berganda**

Nama Variabel	B	T hitung	T tabel	Sig
Konstanta	1,196E11	2,259	2.30600	0,073
DAK	-0,210	0,040	2.30600	0,970
DAU	1,168	3,429	2.30600	0,019
Koefisien Korelasi ( R ) = 0,971	a. Predictors : ( Constant ) DAK, DAU  b. Dependent Variabel : Belanja Modal			
Koefisien Determinasi ( R <sup>2</sup> ) = 0,943				
R Adjusted Square = 0, 920				

Sumber : *Data diolah 2016*

Dari hasil perhitungan statistik melalui program SPSS hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.5 di atas, maka perolehan persamaan hasil regresi sederhananya sebagai berikut:

$$Y = 1,196E11 - 0,210X_1 + 1,168X_2$$

Dari formula model di atas maka dapat dilihat nilai konstanta 1,196E11 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,210 menunjukkan bila DAK dan DAU bernilai 0 (konstan), maka Belanja Modal bernilai 1,196E11.

Sedangkan setiap adanya peningkatan DAK dan DAU 100 rupiah, maka akan terjadi penurunan Belanja Daerah sebesar 210 rupiah. Koefisien DAU 1,168 artinya setiap penambahan DAU 100 rupiah akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,168 rupiah.

### 2. Koefisien Korelasi (R) dan koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dari persamaan regresi, di ketahui bahwa koefisien korelasi (R) =

0,971 yang menunjukkan bahwa derajat terikat (Belanja Modal) memiliki hubungan (korelasi) antara variabel hubungan (korelasi) sangat kuat. bebas (DAK dan DAU) dengan variabel

**Tabel 4.6 Koefisien Korelasi (R) dan koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.971 <sup>a</sup>	0.943	0.920	3.14513E10

a. Predictors: (Constant), DAU, DAK

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : *Data Di Olah, 2016*

Selanjutnya dari tabel juga dapat diketahui koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar = 0,943 atau 94,3%. Ini berarti dalam variabel terikat (Belanja Daerah) dapat dipengaruhi sebesar 94,3% DAU dan DAK dan sisanya sebesar 5,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dari hasil nilai determinasi (R<sup>2</sup>) atau Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap belanja

modal Di Kabupaten Aceh Utara relatif kuat.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### 1) Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 4.7 ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.168E22	2	4.084E22	41.284	0.001 <sup>a</sup>
	Residual	4.946E21	7	9.892E20		
	Total	8.662E22	9			

a. Predictors: (Constant), DAU, DAK

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Tabel 4.7 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 41,284 dengan probabilitas 0,001. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen DAK dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan DAK dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.

## 2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel tergantung di gunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana DAK lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut :

Variabel DAK ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal (Y) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,040 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,30600. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 0,970 atau dengan kata lain pengujian hipotesis ini menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$ . Ini berarti variabel DAK ( $X_1$ ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Variabel DAU ( $X_2$ ) terhadap Belanja Daerah (Y) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,429 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,30600. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 0,19 atau dengan kata lain pengujian hipotesis ini menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Ini berarti variabel DAU ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

## F. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki DAK tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

## G. Daftar Pustaka

- Anonimous, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara di Negara Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar di Indonesia.

- \_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Indonesia.
- Indra, Bastian. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta.
- Tri, Bawano, Bernanda, Gatot. (2008). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus(PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Supriady, Brakatuhsumah, Deddy dan Dadang Solihin. (2001). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- M, Daniel, (2003), Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Imam, Ghozali dan John Castellan. (2006). Statistik non-Parametrik: Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS. Badan Penerbit UNDIP
- Abdul, Halim. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
- Ayu, Kusumadewi, Diah, dan Arief Rahman. (2007). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus(PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Volume 11 No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Moh. Nasir, (2005). Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Hanif, Nurcholis. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. PT. Grasindo: Jakarta.
- Novi, Pratiwi. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus(PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta
- Nur, Indah, Rahmawati. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Khusus(PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada

- Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nugroho, Suratno, Putro. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yusdianto, Prabowo. (2006). Akuntansi Perpajakan Terapan. PT. Grasindo: Jakarta.
- Bambang, Prakosa, Kesit. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). Jurnal JAAI VOLUME 8 NO. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Sony, Yuwono, dkk. (2008). Memahami APBD dan Permasalahannya Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Bayumedia Publishing: Malang-Jawa Timur
- Damodar N. Gujarati, 2003 "*Basic Econometrics*" fourth edition McGraw-Hill, New York.
- Singgih Santoso 2002, "*Mengolah Data Statistik Secara Profesional*" PT Elex Media Komputindo, Jakarta.